BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada jaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama "Cope Napoleon". Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "*Ooor Logs-Overagangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia di saat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari pengalihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang tertarik kembali ke Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersama dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat

berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia dipecah menjadi dua, yaitu :

Kelompok yang bekerja dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut system "*Cooperatif*" (Inspeksi Keuangan Bandung).

Kelompok yang menganut sistem *Non Cooperatif*, yang mana kelompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerja sama dengan Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserah terimakan oleh menteri yang pertama, Mr. Safrudin Prawinegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di Km"0" (*Groofpostweg*), saat ini Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1948, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Barat meliputi: Kota Praja Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak sebelah Timur, kab. Bandung, dan Kota Administratif Cimahi dan berkantor di Jl. Soekarno Hatta Bandung.

2. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang meliputi: Bandung sebelah Timur yang terbelah oleh Jl. Moch. Toha, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. Cicendo, Jl. Cihampelas bagian selatan, Jl. Pasteur bagian timur, Jl. Cipaganti dan Jl. Setiabudhi yang berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung (termasuk Kab. Sumedang).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat Jl. Purnawarman No. 21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai Kepala Kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inspeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan nama dan batas-batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

4. Serta penambahan satu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah.

2.1.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

A. Visi

Menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

a. Menjadi model pelayanan masyarakat

Merupakan refleksi cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintahan lainnya.

b. Berkelas dunia

Adalah keinginan untuk mencapai tingkatan standar dunia atau standar internasional baik untuk kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil- hasilnya.

c. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat

Merefleksi cita-cita untuk mendapatkan kemampuan dari masyarakat bahwa ekstensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

B. Misi

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat agar efektif dan efisien.

C. Motto Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.

Motto Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega adalah SIAP. Huruf S berarti Simpatik, huruf I berarti Ikhlas, huruf A berarti Amanah, dan huruf P berarti Profesional.

D. Logo Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Logo dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega adalah sebagai berikut :

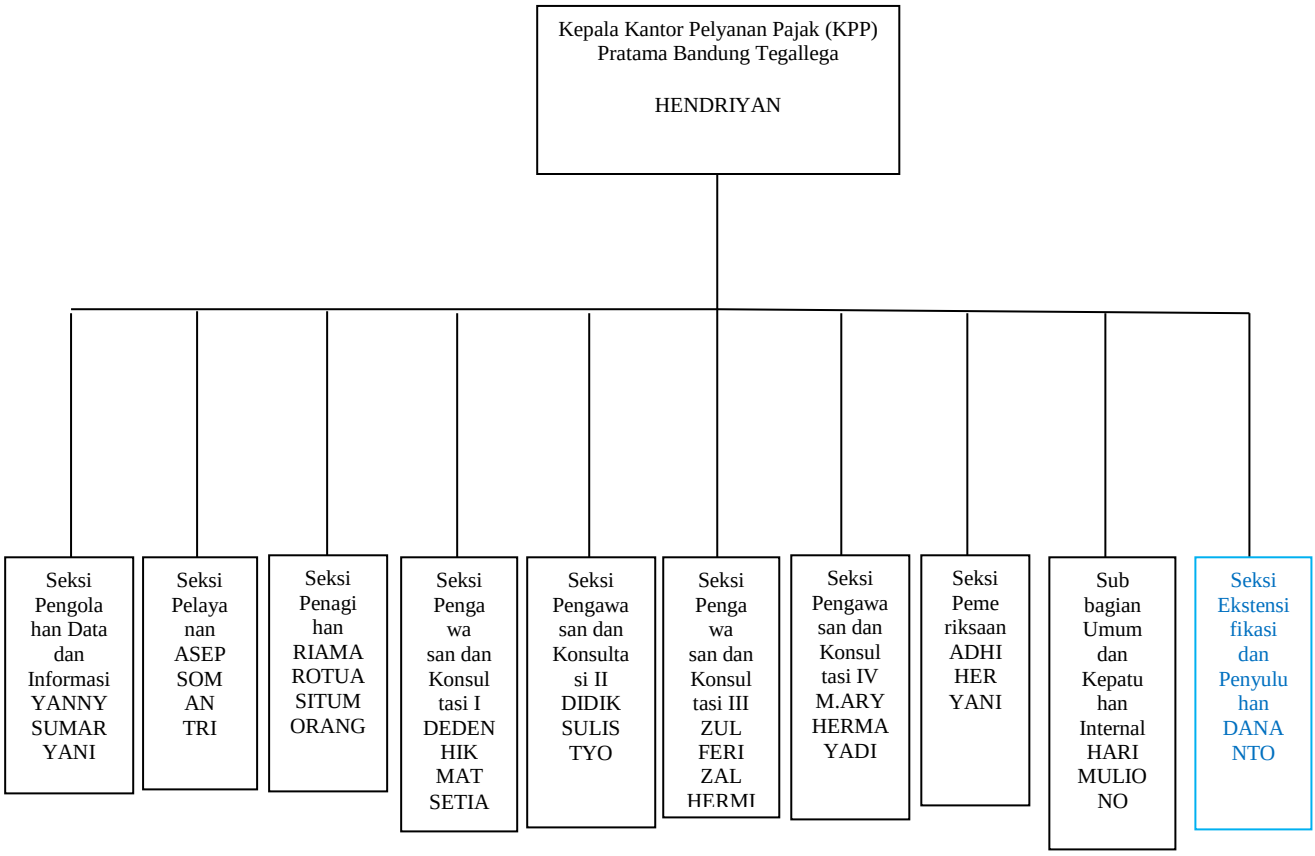


Gambar 2.1

Logo Perusahaan

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

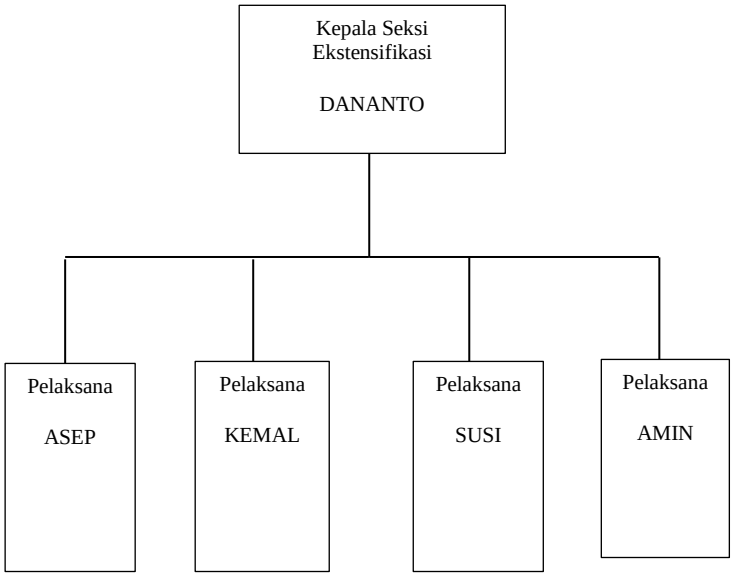
Saat ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega yang berada di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Di dalam Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega terdapat Seksi Pengawasan dan Konsultasi II yaitu seksi dimana penulis ditempatkan untuk melakukan kegiatan Kerja Praktek. Adapun Struktur Organisasi yang terdapat pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3

Struktur Organisasi Seksi Ekstensifikasi

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Adapun uraian tugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor, mempunyai tugas:
   a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan keaktifan pegawai serta pelaksanaan tugas dari masing-masing seksi.
   b. Melakukan pengawasan tentang ketertiban pegawai dan juga sebagai Pembina para pegawai.
   c. Bertanggung jawab terhadap tugas dan memiliki wewenang untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data,

pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, serta pengelolaan kinerja organisasi.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
4. Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

7. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
8. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
9. Seksi Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Adapun uraian tugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Ekstensifikasi bertugas mengkoordinir seluruh tugas-tugas pada seksi Ekstensifikasi, dan kepala seksi dibantu oleh Pelaksana.

2. Pelaksana mempunyai tugas :
    a. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib pajak
    b. bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak
    c. penyusunan profil Wajib Pajak
    d. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi
    e. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.4 Kegiatan Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainya dalam wilayah yang diliputinya sekitar Bojongloa Kidul, Bojongloa Kaler, Babakan Ciparay, Babakan Kulon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega menyelengarakan fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penelitian dan Penata usahaan SPT Tahunan, SPT Masa, serta berkas Wajib Pajak.
3. Pengawasan pembayaran Masa PPh, PPN, PPnBM, PTLL.

4. Penata usahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, dan penyelesaian restitusi PPh,PPN, PPnBM, PTLL.
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan perpajakan.
6. Penerbitan surat ketetapan pajak.
7. Pembetulan surat ketetapan pajak.
8. Pengurangan sanksi pajak.
9. Penyuluhan dan konsultasi pajak.
10. Pelaksanaan administrasi pajak.